

ANALISIS MEKANISME PENERBITAN FAKTUR PAJAK ATAS JASA BROKER ASURANSI DAN PENENTUAN PIHAK YANG WAJIB MEMUNGUT PPN PADA PT ASURANSI JIWA IFG

Oleh:

Elvira Nurmala Sari

ABSTRAK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2022 mengatur bagaimana mekanisme PPN atas transaksi jasa broker asuransi yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan transaksi jasa pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerbitan faktur pajak atas jasa broker asuransi serta menentukan pihak yang berkewajiban memungut PPN pada PT Asuransi Jiwa IFG. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan membandingkan praktik perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK Nomor 67/PMK.03/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa broker asuransi berkewajiban menerbitkan faktur pajak atas jasa yang diserahkan, sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas pembayaran komisi broker. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan interpretasi antara broker asuransi dan perusahaan asuransi terkait pihak yang wajib memungut PPN. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan serta mendukung efektivitas administrasi perpajakan pada transaksi jasa broker asuransi.

Kata kunci: PPN, UU PPN 7/2021, Broker asuransi, PMK-67/2022, faktur pajak.

***ANALYSIS OF THE MECHANISM FOR ISSUING TAX INVOICES
ON INSURANCE BROKERAGE SERVICES AND DETERMINING
THE ENTITY RESPONSIBLE FOR COLLECTING VAT AT
PT ASURANSI JIWA IFG***

By:

Elvira Nurmala Sari

ABSTRACT

Minister of Finance Regulation (PMK) Number 67/PMK.03/2022 regulates the VAT mechanism on insurance brokerage service transactions, which have different characteristics compared to service transactions in general. This study aims to analyze the mechanism for issuing tax invoices on insurance brokerage services and to determine the party responsible for collecting VAT at PT Asuransi Jiwa IFG. This study employed a qualitative descriptive approach using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by comparing the company's practices with the applicable tax regulations, particularly the VAT Law Number 7 of 2021 and PMK Number 67/PMK.03/2022. The results indicate that insurance brokers are responsible for issuing tax invoices for the services rendered, while insurance companies are designated as the parties responsible for collecting, depositing, and reporting VAT on broker commission payments. However, in practice, there are still differences in interpretation between insurance brokers and insurance companies regarding the party obligated to collect VAT. This study is expected to enhance understanding of taxation and support the effectiveness of tax administration in insurance brokerage service transactions.

Keywords: VAT, VAT Law Number 7 of 2021, insurance broker, PMK Number 67/PMK.03/2022, tax invoice.